

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

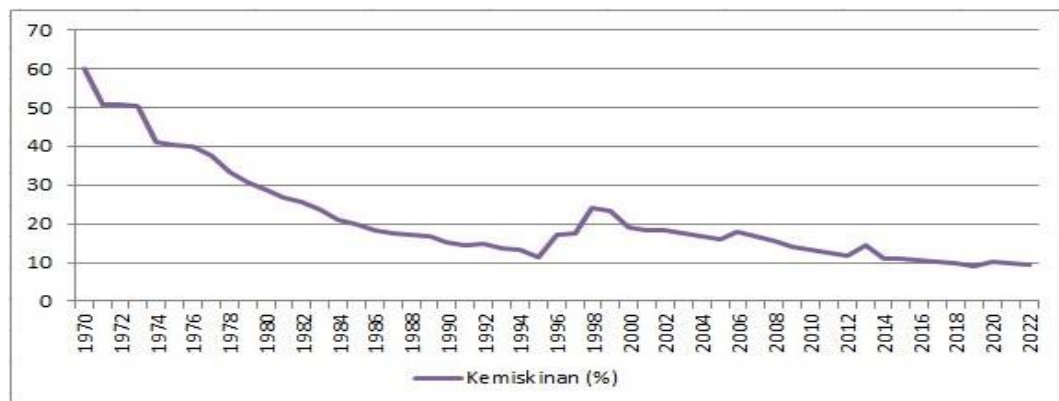
Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, kemiskinan harus segera diatasi agar tidak menjadi masalah besar dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, dalam lingkup internasional kemiskinan telah menjadi agenda yang tertuang dalam tujuan pembangunan milenium. Secara umum, kemiskinan bisa disebabkan oleh banyak hal. Menurut (Todaro et al., 2014) kemiskinan terjadi bukan karena tidak memiliki komoditi tetapi karena masyarakat kurang mampu mengoptimalkan fungsi dan manfaat dari komoditi tersebut. Kemudian menurut (Dowling et al., 2004), kemiskinan terjadi karena rendahnya modal manusia, seperti pelatihan, pendidikan, atau kemampuan membangun serta rendahnya modal fisik.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata tetapi juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Kegagalan dalam mengatasi masalah kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik di tengah-tengah masyarakat. Isu kemiskinan termasuk dalam masalah kemanusiaan, dan di

butuhkan upaya yang sangat terintegrasi untuk mengatasinya. Bahkan sampai saat ini, masih belum ditemukan suatu rumusan maupun formula untuk penanganan masalah kemiskinan sehingga harus terus dikembangkan.

Mengurangi kemiskinan di Indonesia yang harus diketahui terlebih dahulu adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan sehingga kedepannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Negara ini dengan meningkatkan kebijakan energi yaitu memberikan subsidi kepada masyarakat. Berikut data kemiskinan di Indonesia yang diambil dari BPS tahun 1970 sampai 2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa persentase penduduk di Indonesia dalam rentang waktu 1970-2022 mengalami fluktuasi, terlihat bahwa terdapat variasi signifikan dalam kemiskinan selama periode tersebut. Fluktuasi ini mencerminkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang mempengaruhi kondisi kemiskinan di Indonesia selama lebih dari dua dekade.

Periode signifikan dalam perubahan kemiskinan terjadi pada awal tahun 1990-an. Pada tahun 1993, kemiskinan mencapai 13,70% dan kemudian turun menjadi 13,47% pada tahun berikutnya. Faktor utama yang berkontribusi pada fluktuasi awal ini adalah ketidakstabilan ekonomi global dan krisis finansial regional yang mempengaruhi Indonesia pada saat itu. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan peningkatan angka kemiskinan.

Pertengahan hingga akhir 1990-an kemiskinan mulai menurun. Faktor yang berperan di sini adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, seiring dengan berbagai program pembangunan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Misalnya, pada tahun 1998 pemerintah meluncurkan program "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat" (PNPM) yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin dan menurunkan kemiskinan.

Kenaikan yang signifikan dalam kemiskinan pada tahun 2003 ketika kemiskinan mencapai 24,23%. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kenaikan ini adalah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Krisis tersebut mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tinggi dan pengangguran yang meningkat sehingga semuanya berkontribusi pada peningkatan kemiskinan.

Periode berikutnya, beberapa tahun di antaranya mengalami penurunan kemiskinan, seperti pada tahun 2005 dan 2006. Ini sebagian besar disebabkan oleh upaya pemerintah dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan, seperti program-program bantuan sosial, pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Namun, fluktuasi kemiskinan masih

terjadi sepanjang periode ini dengan penurunan dan kenaikan yang berulang. Faktor-faktor seperti perubahan dalam pertumbuhan ekonomi, gejolak pasar internasional, bencana alam dan perubahan kebijakan pemerintah semua berperan dalam fluktuasi ini.

Penyebab persentase kemiskinan di Indonesia pada tahun 2013 dan 2015 meningkat karena kenaikan harga kebutuhan pokok. Kemudian dari tahun 2016 sampai 2019 kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yang cukup baik yang disebabkan oleh naiknya rata-rata upah riil buruh perhari, rendahnya angka inflasi dan adanya kebijakan dari pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan seperti penyaluran PKH, reformasi subsidi pangan dan energi.

Tahun 2020 dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang memiliki dampak besar pada perekonomian global. Indonesia tidak luput dari dampak ini yang mengakibatkan peningkatan kemiskinan pada tahun 2020. Banyak pekerja kehilangan mata pencaharian mereka akibat lockdown dan pembatasan sosial yang diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus.

Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan tidak terlepas dari anggaran belanja pemerintah dalam membuat kebijakan atau program mengatasi kemiskinan. Belanja pemerintah berada di posisi yang sangat strategis untuk mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan dan dimensi teritorial untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan populasi. Melalui kebijakan dan alokasi anggaran negara, pemerintah memiliki peran untuk dimainkan dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran dari agenda pembangunan, mendukung stabilitas ekonomi, dan mempromosikan distribusi pendapatan yang lebih adil (Bachtiar, 2013). Dari

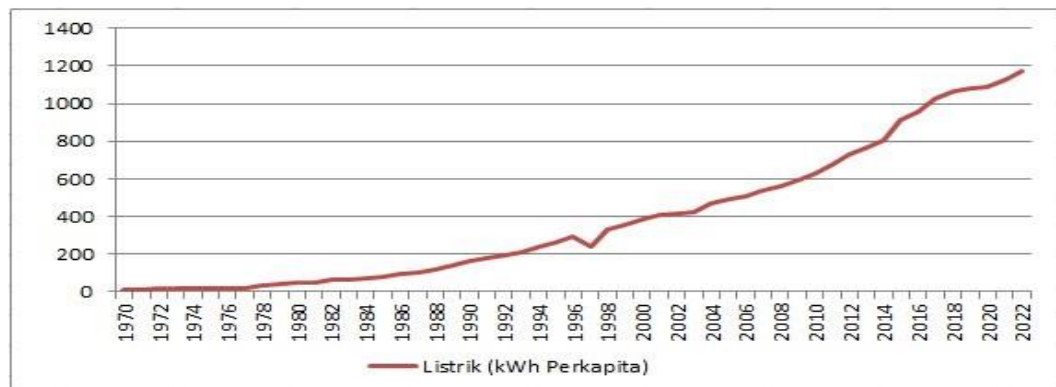
anggaran belanja pemerintah, pemerintah melaksanakan kebijakan atau program untuk membantu masyarakat miskin, seperti subsidi energi sehingga penduduk miskin dapat menikmati energi setara dengan penduduk non miskin.

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) (2017), Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang luar biasa besarnya. Potensi sumberdaya ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan akses energi secara merata dan bersih. Meski begitu, saat ini penggunaan energi bersih dan terbarukan di Indonesia baru mencapai kisaran 6% dari bauran energi nasional. Dengan melihat potensi energi terbarukan yang tersebar, penyediaan energi dalam negeri terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses terhadap energi bisa dipenuhi dengan potensi-potensi lokal.

Energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus menerus meningkat sejalan dengan tingkat kehidupan. Energi sangat penting bagi kebutuhan dasar manusia karena segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia membutuhkan energi. Energi memiliki peranan penting bagi kehidupan umat manusia, yang mana manusia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap energi. Dengan meningkatnya permintaan akibat pertumbuhan penduduk, industri perlu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selain itu, penipisan cadangan fosil dan pertumbuhan konsumsi energi yang terus meningkat telah menyebabkan kelangkaan. Oleh karena itu, sumber energi alternatif perlu digali dan dikembangkan. Pemerintah harus merumuskan kebijakan energi baru untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan menghindari krisis energi. Penggunaan energi seperti listrik dan BBM sangat penting bagi kegiatan usaha dan rumah

tangga. Besarnya kebutuhan energi di Indonesia seringkali melebihi ketersediaannya.

Kebutuhan listrik dan bahan bakar bagi umat manusia sangatlah penting, karena semua sektor ekonomi di suatu negara mulai dari pertanian, industri, pertambangan, transportasi, perdagangan, dan jasa membutuhkan bahan bakar yang terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian suatu negara. Listrik merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, dimana semua kegiatan manusia berhubungan dengan energi listrik. Listrik juga merupakan salah satu kebutuhan pokok rumah tangga yang urgensitasnya tinggi, sehingga sehari-hari pemakaian listrik tidak bisa terhenti. Listrik sebagai sumber kehidupan masyarakat selain berfungsi sebagai penerangan, juga berfungsi sebagai energi dalam mengembangkan segala usaha dan aktifitas sehari-hari. Kebutuhan akan tenaga listrik dari pelanggan selalu bertambah dari waktu ke waktu. Penggunaan listrik didasarkan atas suplai energi yang murah dan penggunaan energinya lebih mudah dibandingkan dengan energi lainnya. Listrik juga sangat berperan penting dalam menunjang segala aktifitas yang berlangsung baik pada sektor industri, bangunan komersial, transportasi maupun rumah tangga. Berikut data konsumsi listrik di Indonesia dari tahun 1970 sampai 2022.



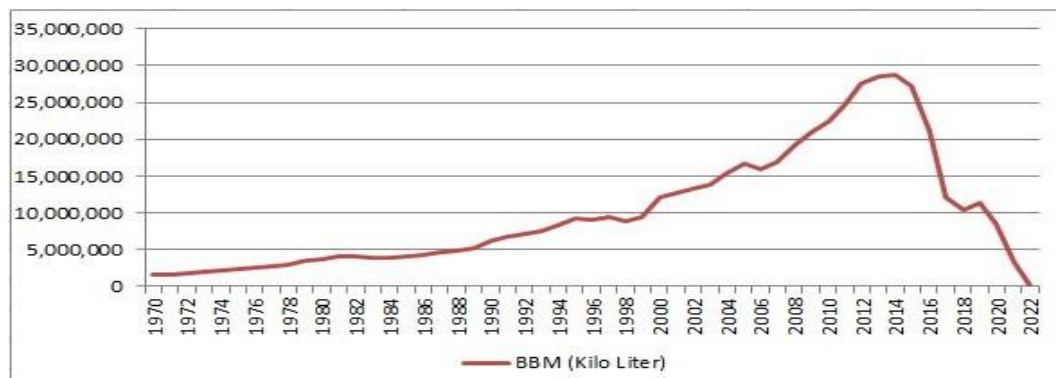
Sumber : Kementerian ESDM (2022)

Gambar 1.2 Konsumsi Listrik di Indonesia

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa konsumsi listrik di Indonesia dari tahun 1970-2022 terus mengalami peningkatan, di mana konsumsi listrik di Indonesia tertinggi pada tahun 2022 yaitu 1.173 kWh perkapita. Faktor penting yang memengaruhi peningkatan ini adalah adanya program pemerintah untuk meningkatkan akses listrik ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum teraliri listrik. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif, seperti program "Indonesia Terang" dan "Listrik Desa," yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan listrik ke daerah-daerah terpencil dan masyarakat yang kurang mampu. Peningkatan ini mencerminkan kesuksesan dari upaya tersebut.

Ketersediaan listrik yang memadai dan tepat sasaran akan memacu perkembangan pembangunan daerah seperti sektor industri, bisnis, pelayanan publik dan bahkan kualitas hidup masyarakat dengan semakin banyaknya warga yang menikmati listrik. Kemudian secara langsung maupun tidak langsung, hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bahan Bakar Minyak (BBM) juga sangat penting bagi kehidupan masyarakat seperti di bidang pertanian, bahan bakar ini dibutuhkan untuk menggerakkan peralatan pertanian (Rafiq et al., 2009), (Adam et al., 2016), (Adam et al., 2018). Dalam bidang industri, bahan bakar dibutuhkan untuk menggerakkan mesin mesin industri dalam memproduksi barang. Dalam bidang transportasi dan perdagangan, BBM dibutuhkan untuk menggerakkan alat transportasi baik angkutan barang maupun angkutan umum. Di bidang pertambangan, bahan bakar juga dibutuhkan untuk menggerakkan peralatan pertambangan dalam memproduksi mineral. Selain itu, rumah tangga juga membutuhkan BBM dalam jumlah besar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan rumah tangga. Berikut data konsumsi BBM di Indonesia dari tahun 1970 sampai 2022.

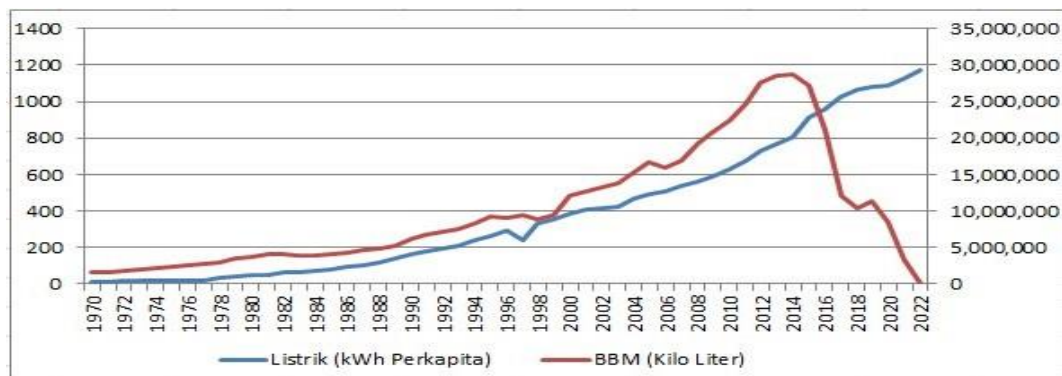


Sumber : Kementerian ESDM (2022)

Gambar 1.3 Konsumsi BBM Di Indonesia

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa konsumsi BBM di Indonesia dalam kurun waktu 53 tahun yang tidak stabil, konsumsi BBM mengalami fluktuasi yang lebih besar sepanjang periode tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi konsumsi BBM antara lain adalah perubahan harga minyak dunia, kebijakan pemerintah terkait subsidi energi, serta kapasitas produksi dalam negeri. Terdapat

beberapa tahun di mana konsumsi BBM meningkat secara signifikan, seperti pada tahun 2014 ketika konsumsi BBM mencapai 28,822,039 kiloliter. Hal ini dapat dihubungkan dengan lonjakan harga minyak dunia pada periode tersebut yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam rangka mengamankan pasokan energi domestik. Meskipun demikian, fluktuasi konsumsi BBM juga terdapat pada tahun-tahun lainnya, seperti penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yang dapat didistribusikan pada dampak pandemi COVID-19 terhadap permintaan minyak dan harga minyak yang jatuh. Di samping itu, kebijakan pemerintah terkait peningkatan penggunaan energi terbarukan dan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada BBM juga memengaruhi fluktuasi ini.



Sumber: Kementerian ESDM (2022)

Gambar 1.4 Konsumsi Listrik dan BBM di Indonesia

Gambar 1.4 menunjukkan konsumsi listrik di Indonesia mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, sedangkan konsumsi BBM di Indonesia mengalami fluktuasi dalam rentang waktu 1970 hingga 2022, terdapat sejumlah peristiwa dan faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab fluktuasi tersebut.

Hubungan antara konsumsi listrik dan konsumsi BBM tidak selalu berbanding lurus. Meskipun konsumsi listrik di Indonesia terus meningkat, konsumsi BBM

tidak selalu mengikuti tren yang sama. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia semakin beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk penerangan, seperti listrik dari energi terbarukan.

Faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak dunia dan perubahan dalam tata kelola energi juga memainkan peran penting dalam fluktuasi ini. Pemerintah perlu terus melakukan penyesuaian kebijakan energi untuk mengurangi ketergantungan pada BBM dan mempromosikan penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

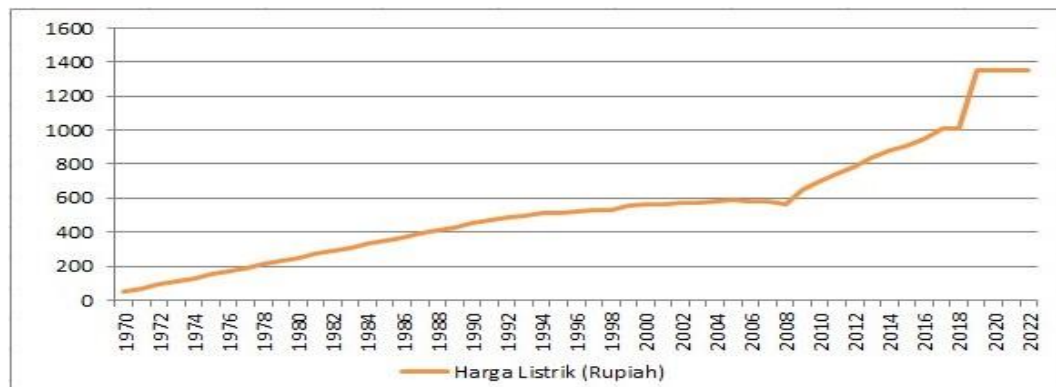
Menurut *International Energi Agency* (IEA) (2011) subsidi energi merupakan tindakan pemerintah menurunkan harga energi yang dibayar oleh konsumen, menaikkan harga yang diterima oleh produsen atau menurunkan biaya produksi. Dengan adanya subsidi energi, harga bahan bakar minyak (BBM), dan listrik menjadi lebih murah. Subsidi konsumsi energi digunakan untuk memastikan bahwa semua konsumen, terutama rumah tangga miskin, memiliki akses ke tingkat konsumsi energi minimum (Blum et al., 2013).

Kebijakan subsidi energi bertujuan untuk menjaga harga energi agar tetap stabil dan terjangkau untuk masyarakat. Dengan adanya subsidi energi akan mekan masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses energi yang tidak mampu mereka beli. Akan tetapi, salah satu masalah di Indonesai terkait subsidi energi adalah masyarakat yang mampu juga menikmati akses subsidi energi yang diberikan pemerintah karena lemahnya system pengawasan pemerintah.

Subsidi energi masyarakat kalangan menengah ke bawah atau masyarakat miskin dapat tetap menikmati penggunaan energi yang melimpah dengan harga

yang terjangkau dan dapat menjalankan kegiatan ekonomi. Subsidi energi berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adanya subsidi energi dapat membantu masyarakat miskin untuk memperoleh akses energi. Energi memainkan peran penting dalam memastikan penyaluran layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, seperti pekerjaan, makanan, layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih dan sanitasi (Hussein et al., 2012). Dimana seperti yang kita ketahui bahwa hampir seluruh kegiatan rumah tangga memerlukan energi, baik berupa bahan bakar maupun listrik. Berdasarkan *The World Bank Group Energi Sector Strategy* (2010) tujuan subsidi dapat membantu masyarakat miskin dan meningkatkan kesetaraan, mencapai keamanan energi, mengoreksi eksternalitas, dan mendukung produksi dalam negeri yang terkait dengan pekerjaan.

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (2022) untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri dalam pemulihan ekonomi, pemerintah tetap akan mempertahankan subsidi energi. Realisasi subsidi energi pada tahun 2022 sebesar Rp 157,6 triliun, jumlah tersebut naik 28,4 % dari tahun sebelumnya. Realisasi subsidi energi paling banyak digunakan untuk listrik yaitu 37,9% dan untuk BBM yaitu 62,06%. Pada subsector ketenagalistrikan, pemerintah akan terus mendorong peningkatan kapasitas pembangkit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut dapat dilihat data harga listrik yang disubsidikan oleh pemerintah Indonesia dari tahun 1970 sampai 2022.



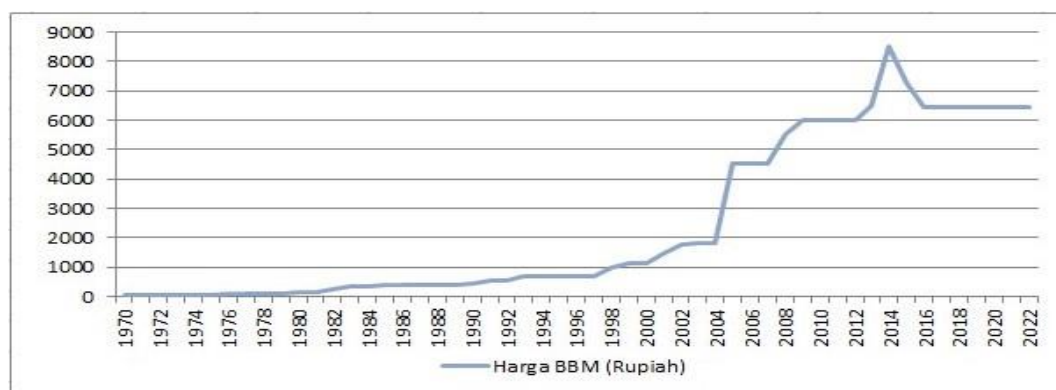
Sumber : Kementerian ESDM (2022)

Gambar 1.5 Harga Listrik Bersubsidi per kWh di Indonesia

Gambar 1.5 menunjukkan harga listrik bersubsidi per kWh di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 1970 hingga 2022. Harga listrik bersubsidi yang meningkat karena pemerintah masih mengendalikan harganya sebagai upaya untuk meningkatkan akses listrik ke masyarakat. Selain itu, harga listrik yang meningkat secara bertahap karena meningkatnya permintaan dan biaya operasional dalam menghasilkan listrik. Pada tahun 2014, pemerintah juga memutuskan untuk mengurangi subsidi listrik, yang membuat harga listrik semakin tinggi.

Tahun 2013-2022 harga listrik bersubsidi di Indonesia mengalami peningkatan yang konsisten, mulai dari 840 Rupiah per kWh pada awal periode hingga mencapai 1352 Rupiah per kWh pada tahun terakhir. Kenaikan harga listrik bersubsidi ini sebagian besar dipicu oleh faktor internal seperti biaya produksi yang semakin meningkat, yang berakar pada kenaikan harga komoditas energi fosil. Faktor-faktor ini termasuk dalam asumsi makro ekonomi, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan harga batu bara. Pemerintah secara sistematis menyesuaikan tarif listrik untuk mencerminkan perubahan dalam faktor-faktor ini.

Harga BBM dalam negeri sering kali lebih rendah daripada kenaikan harga minyak mentah dunia. Dalam situasi seperti ini, pemerintah mengimplementasikan subsidi BBM untuk menjaga harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat. Meskipun subsidi ini memberikan manfaat, mereka juga menimbulkan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Berikut data harga BBM di Indonesia dari tahun 1970 sampai 2022.



Sumber : Kementerian ESDM (2022)

Gambar 1.6 Harga BBM Bersubsidi per Liter di Indonesia

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa harga BBM bersubsidi per liter di Indonesia dalam rentang waktu 1993-2022 mengalami fluktuasi. Tahun 1993 sampai 2000 harga BBM relatif stabil. Pada saat itu, pemerintah Indonesia masih memberlakukan subsidi kuat terhadap BBM, menjadikan harga BBM rendah dan stabil.

Tahun 2000-an terjadi lonjakan harga BBM bersubsidi. Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia mengurangi subsidi BBM yang menyebabkan kenaikan harga BBM secara signifikan. Selain itu, faktor global seperti kenaikan harga minyak mentah juga mempengaruhi harga BBM. Tahun 2010 - 2015 harga BBM cenderung stabil kembali setelah pemerintah Indonesia kembali memberlakukan subsidi.

Namun, pada tahun 2014 terjadi kenaikan tajam dalam harga BBM yang mencapai 8500/liter, seiring dengan penghapusan subsidi BBM oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan fluktuasi besar dalam harga BBM.

Tahun 2016 – 2022, harga BBM mengalami stigma dan stabil. Menurut Kementerian ESDM pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM pada tahun tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat, namun pemerintah juga mengurangi kuota penyaluran BBM terhadap masyarakat karena pemerintah mengarahkan masyarakat untuk mengonsumsi bahan bakar yang lebih bersih yaitu beroktan lebih tinggi. Meskipun pemerintah telah melakukan pencabutan BBM premium bersubsidi sejak tahun 2015 harga tidak diserahkan ke pasar namun tetap pemerintah yang menentukan harga melalui Kementerian ESDM.

Hubungan antara harga listrik dan harga BBM di Indonesia tahun 1970 – 2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: Kementerian ESDM (2022)

Gambar 1.7 Harga Listrik Bersubsidi per kWh dan Harga BBM Bersubsidi per Liter

Gambar 1.7 menunjukkan bahwa harga listrik bersubsidi dan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia dalam rentang waktu 1993-2022 mengalami fluktuasi. Harga listrik bersubsidi dan harga BBM bersubsidi memiliki

hubungan yang erat dalam ekonomi Indonesia. Kenaikan harga listrik dapat memengaruhi biaya hidup masyarakat karena listrik adalah kebutuhan dasar, sementara kenaikan harga BBM dapat mengakibatkan kenaikan biaya transportasi dan inflasi, yang mempengaruhi daya beli masyarakat (D. S. Hartono, 2011). Dalam penelitian ini, mengenai kebijakan energi dan kemiskinan di Indonesia, perubahan harga listrik dan BBM harus dianalisis secara bersamaan. Keputusan kebijakan energi, seperti subsidi energi atau penyesuaian harga dapat memengaruhi tingkat kemiskinan (Suryadi, 2015). Analisis kebijakan-kebijakan harga energi dapat memengaruhi berbagai sektor ekonomi dan pendapatan masyarakat, serta berkontribusi pada peningkatan atau penurunan kemiskinan di Indonesia.

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mengurangi subsidi energi secara bertahap dalam rangka mengurangi tekanan pada anggaran negara. Salah satu pendekatan yang diambil adalah dengan menyesuaikan harga BBM ke tingkat yang lebih mendekati harga pasar. Keputusan untuk menaikkan harga BBM pada 1 April 2022 adalah langkah yang diambil untuk mencapai tujuan ini. Meskipun kebijakan ini dapat memicu berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di masyarakat, pemerintah telah mempertimbangkan dengan matang dan menganggapnya sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mengurangi dampak negatif pada perekonomian. Pada akhirnya, hubungan antara harga listrik dan harga BBM adalah dinamis dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks.

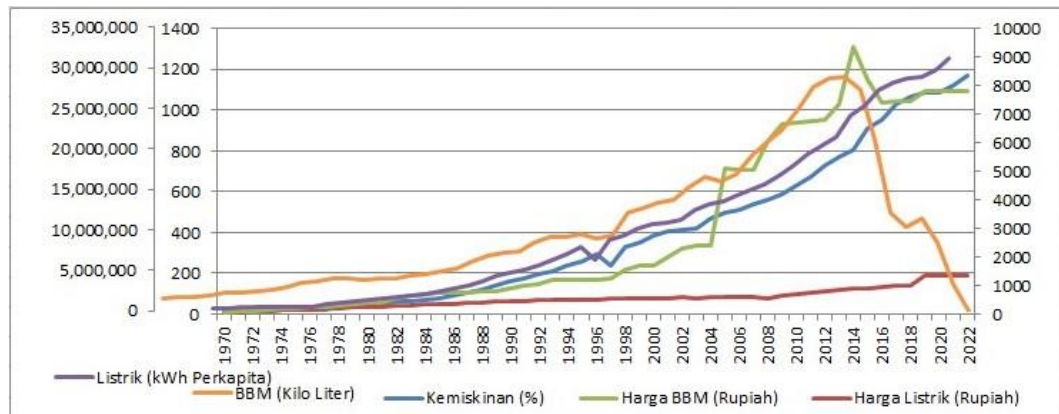
Pro dan kontra dalam kenaikan harga bahan bakar minyak, kita seharusnya juga sadar akan penggunaan bahan bakar minyak yang semakin lama semakin menipiskan persediaan minyak bumi di dunia ini. Terdapat aturan yang mengatur

mengenai kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup. Sehingga diperlukan kebijakan dan atau program pembangunan yang senantiasa memperhatikan konservasi terhadap lingkungan hidup untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan (Susilo et al., 2020). Pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Najicha, 2021). Dapat diartikan bahwa pemerintah semestinya tidak sewenang-wenang dalam menetapkan harga bahan bakar minyak dikarenakan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 telah dijelaskan bahwa apapun kebijakan yang diambil mengenai pemanfaatan kekayaan alam haruslah didasarkan pada kepentingan rakyat. Kenaikan harga minyak dunia yang bergejolak serta meningkat drastis memaksa Indonesia mengeluarkan banyak anggaran sehingga menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan anggaran pembangunan. Alasan utamanya adalah dasar dari perhitungan APBN adalah harga minyak dunia, akan tetapi posisi Indonesia sekarang ini yang bukan sebagai pemasok minyak bumi melainkan adalah sebagai pengimpor minyak bumi membuat pemenuhan anggaran pembangunan yang sangat sulit dilakukan (Harunurrasyid, 2013).

Kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan biaya produksi (Sugden, 2009), (Baumeister et al., 2014), (Adam et al., 2016) dan biaya transportasi. Kenaikan biaya produksi akan berdampak pada kenaikan harga barang atau inflasi

di dalam negeri. Sehingga pada gilirannya dapat menurunkan daya beli masyarakat yang berdampak pada bertambahnya kemiskinan.

Keseluruhan kebijakan energi listrik, BBM, harga listrik, harga BBM terhadap kemiskinan di Indonesia dapat dilihat polanya dibawah ini.



Sumber: BPS dan Kementerian ESDM (2022)

Gambar 1.8 Grafik Listrik, BBM, Harga Listrik, Harga BBM dan Kemiskinan di Indonesia

Gambar 1.8 menunjukkan bahwa kebijakan energi di Indonesia dari tahun 1970 hingga 2022 menalami fluktuasi. Hubungan yang dapat dilihat antara kemiskinan dan konsumsi listrik, ketika kemiskinan menurun konsumsi listrik di Indonesia cenderung meningkat. Ini mengindikasikan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber energi yang lebih bersih dan lebih efisien (Christiani et al., 2021). Sedangkan konsumsi BBM tidak mengikuti tren yang sama. Fluktuasi dalam konsumsi BBM dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan produksi, harga minyak dunia, dan investasi dalam eksplorasi minyak. Pada tahun 2015, terjadi penurunan konsumsi BBM yang signifikan, yang berdampak pada kenaikan harga BBM.

Gambar 1.8 menunjukkan bahwa harga listrik dan BBM dari tahun 1993 hingga 2022 dengan semua kebijakan pemerintah atas kebijakan energi terlihat bahwa pada tahun 2014 harga BBM melambung tinggi, kenaikan harga BBM ini mengakibatkan kemiskinan semakin rendah. Di saat yang sama pemerintah juga menaikkan tarif dasar listrik, sehingga kenaikan harga BBM ini diikuti oleh kenaikan harga listrik. Kenaikan harga listrik ini yang memicu kemiskinan yang semakin menurun. Namun, pada tahun berikutnya akibat kenaikan harga listrik dan harga BBM ini menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan kembali mencapai 11,13 %. Kemudian tahun 2016 harga BBM mengalami penurunan kembali sehingga kemiskinan di Indonesia juga ikut menurun, tetapi pada harga listrik di tahun yang sama tidak mengikuti tren yang sama.

Kemiskinan dan harga BBM per barel tampaknya memiliki korelasi invers. Ketika kemiskinan naik, harga BBM Premium per barel cenderung turun, dan sebaliknya (Muhardi, 2005). Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengendalikan harga BBM melalui subsidi atau kebijakan tertentu (Munawar, 2013).

Tahun 1993 harga listrik dan harga BBM di Indonesia berada pada titik paling rendah, tetapi kemiskinan tidak mengikuti tren yang sama dengan keduanya. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan disetiap tahunnya, sedangkan untuk harga listrik dan harga BBM mengalami peningkatan yang cukup stabil.

Analisis lebih mendalam perlu diperhatikan faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi harga minyak dunia, dan kondisi ekonomi global yang dapat memengaruhi variabel-variabel ini. Selain itu, implikasi dari hubungan antar variabel ini terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perlu dipelajari lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul “**Analisis Kebijakan Energi Terhadap Kemiskinan di Indonesia**” karena pada penelitian ini penulis menggunakan kebijakan energi secara keseluruhan pada variabel independen yang berkaitan dengan energi listrik, BBM, harga listrik dan harga BBM. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan sebagian dari kebijakan energi seperti harga BBM ataupun listrik, selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data terbaru selama 53 tahun mulai tahun 1970 sampai 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pengaruh konsumsi listrik terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh konsumsi BBM terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh harga listrik terhadap kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimanakah pengaruh harga BBM terhadap kemiskinan di Indonesia?

5. Bagaimanakah pengaruh konsumsi listrik, BBM, harga listrik dan harga BBM terhadap kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh konsumsi listrik terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Mengatahui pengaruh konsumsi BBM terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Mengatahui pengaruh harga listrik terhadap kemiskinan di Indonesia.
4. Mengatahui pengaruh harga BBM terhadap kemiskinan di Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh konsumsi listrik, BBM, harga listrik, dan harga BBM terhadap kemiskinan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat kegunaan secara teoritis dan praktis untuk berbagai pihak yang membaca:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis di masa mendatang dan juga dapat memperkaya kajian studi Ekonomi Pembangunan.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yaitu terkait dengan kebijakan energi terhadap kemiskinan di Indonesia.
- c. Dapat memberikan tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang kebijakan energi terhadap kemiskinan di indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Dapat menjadi masukan terutama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait kebijakan energi terhadap kemiskinan di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat, dapat dimanfaatkan untuk menjadikan referensi dan informasi tentang kebijakan energi yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi semua pihak yang akan melakukan analisis mengenai kebijakan energi terhadap kemiskinan di Indonesia.